

ISSN :  
1693 - 2897

3



**AGRITROP**

***JURNAL  
ILMU-ILMU PERTANIAN***

***(Journal of Agricultural Sciences)***

**Vol. 7 No. 1  
Juni 2009**

**JURNAL AGRITROP**  
**Vol. 7 No. 1, Juni 2009**

<b>DAFTAR ISI</b>	<b>Hal.</b>
Dampak kenaikan harga beras terhadap kesejahteraan petani padi di Kabupaten Jember, oleh Henik Prayuginingsih dan Teguh Hari Santoso .....	1
Analisis perwilayahan komoditas jagung di Kabupaten Bondowoso, oleh Achmad Budisusetyo, Maspur, dan Edi Yulianto .....	8
Uji beberapa bentuk beras terhadap jumlah dan kesesuaian telur <i>Corcyra cephalonica</i> sebagai inang pengganti dalam pembiakan massal parasitoid <i>Trichogramma</i> sp., oleh Endang Warih Minarni dan Wiyantono .....	15
Model dinamika perilaku sistem sebagai analisis strategi kebijakan pengembangan agroekosistem lahan kering, oleh Muhammad Chabib Ichsan .....	19
Respon tanaman tomat ( <i>Lycopersicon esculentum</i> Mill) dengan penambahan konsentrasi 2 jenis auksin dan kinetin secara invitro, oleh Wiwit Widiarti, Iskandar Umarie, dan Ayat Hidayat .....	31
Penggunaan daun kenaf sebagai pupuk organik cair pada tanaman sawi ( <i>Brassica juncea</i> L.), oleh Oktarina, Iskandar Umarie, dan Eko Hadi Prayitno .....	39
Responsibilitas varietas akibat penggunaan dosis pupuk Guano terhadap produksi tomat ( <i>Lycopersicon esculentum</i> Mill), oleh Bagus Tripama, Muhammad Chabib Ichsan, dan Elfien Herianto .....	44
Kajian finansial dan nilai tambah gula semut (Granular Sugar) di Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, oleh Tatang Widjojoko, Altri Mulyani, dan Irene Kartika Eka Wijayanti .....	55
<del>Analisis daya saing komoditas benur HSRT dalam prospek pembangunan perikanan di Kabupaten Situbondo, oleh Saptia Prawitasari .....</del>	<del>63</del>
Kajian sosial dan ekonomi program PHBM di kawasan hutan tangkapan air lereng Gunung Raung, oleh Teguh Hari Santosa, Insan Wijaya, dan Arief Noor Akhmadi .....	70
Usaha peningkatan mutu serat sabut kelapa (coco fiber) di Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen, oleh Budi Dharmawan dan Sundari .....	77
Prospek pengembangan komoditas perikanan laut ditinjau dari segi ekonomi dan kelembagaan di Kabupaten Situbondo, oleh Akbar Pradopo .....	83
Pengembangan industri biologis sarang liur walet Kabupaten Jember melalui model Analisis Hirarki Proses (AHP), oleh Hari Rujito .....	91

# ANALISIS DAYA SAING KOMODITAS BENUR HSRT DALAM PROSPEK PEMBANGUNAN PERIKANAN DI KABUPATEN SITUBONDO

## [ANALYSE THE COMPETITION ADVANTAGE GERM SHRIM FROM MINY HATCHERY ON SITUBONDO DISTRICT AND DEVELOPMENT PROSPECTIVE]

oleh  
Saptya Prawitasari  
Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Jember  
Jl. Karimata 49 Jember, 68121  
saptya\_prawitasari@yahoo.com

### ABSTRAK

Obyek utama kajian adalah untuk mengetahui daya saing komoditas benur yang dihasilkan oleh *hatchery* skala rumah tangga (HSRT) serta dampak berbagai kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah baik terhadap input maupun output komoditas benur. Analisis daya saing dan pengaruh kebijakan pemerintah menggunakan Policy Analysis Matrix (PAM) dalam Soetriono. Keputusan kajian menunjukkan Komoditas benur di Kabupaten Situbondo memiliki daya saing pada tingkat harga privat dan pada tingkat harga sosial. Terdapat kebijakan pemerintah terhadap input tradeable yang menguntungkan produsen benur HSRT. Terdapat kebijakan pemerintah terhadap input non tradeable yang menaikkan biaya produksi dan menyebabkan produsen terbebani biaya lebih besar dari biaya yang semestinya dikeluarkan. Terdapat kebijakan pemerintah terhadap output yang menyebabkan harga domestik output lebih tinggi dari harga dunia.

Kata kunci : daya saing komoditas benur, prospek pembangunan sistem perikanan

### ABSTRACT

The main object of this study are to analyse the competition advantage germ shrim from miny hatchery on Situbondo district and the effect of government policies. To analyse the competition germ shrim which based on the Policy Analysis Matrix by Monkey and Person in Soetriono (2006). The result in Situbondo show that germ shrim have the comparative and competitive advantage on the private price and the social price.

Key words : competition advantage germ shrim, prospective of development miny hatchery system

### PENDAHULUAN

Pembangunan sektor perikanan bertujuan meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan usaha perikanan rakyat melalui pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara lestari dan berkelanjutan. Pembangunan perikanan juga diarahkan untuk meningkatkan kontribusi perikanan dalam pembangunan nasional sebagai penghasil devisa, yang dilaksanakan melalui peningkatan produktivitas yang berorientasi pada perluasan kesempatan kerja, peningkatan nilai tambah, efisiensi usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani dan nelayan.

Handoko (2008) menyatakan bahwa sektor perikanan laut dapat dikembangkan dengan memadukan aspek-aspek teknis dan sosial ekonomi, dengan memperhatikan sumberdaya yang ada, nelayan serta struktur dan lembaga pasar. Senada dengan pernyataan di atas Atjo (2008) mengemukakan bahwa pembangunan sektor perikanan yang maju dapat dicapai dengan mengarahkan strategi pembangunan pada perekonomian pasar melalui pendekatan agribisnis, yang diharapkan mampu meningkatkan peran sektor perikanan dalam

pembangunan nasional. Hal ini dapat tercapai apabila komoditas dan perwilayahannya didasarkan pada keunggulan komparatif dan kompetitif dalam memenuhi skala ekonomis tertentu, serta mampu mengendalikan produksi secara kontinu.

Sektor perikanan laut sampai saat ini memberikan kontribusi besar bagi total produksi perikanan nasional. Propinsi Jawa Timur dengan potensi luas tambak 39.000 ha, merupakan salah satu sentra terbesar pengembangan budidaya perikanan ([www.agrina-online.com](http://www.agrina-online.com), 2008). Salah satu daerah yang memberikan kontribusi besar terhadap sektor perikanan di Jawa Timur adalah Kabupaten Situbondo yang potensial bagi kegiatan perikanan budidaya. Pembangunan sektor perikanan laut di Kabupaten Situbondo dilaksanakan untuk mendukung kesatuan ekonomi dengan penggunaan sumberdaya laut.

Potensi perikanan yang terdapat pada perikanan budidaya terutama udang sangat besar, sebab komoditas udang menempati urutan pertama terbesar dalam deretan komoditas ekspor non migas mencapai 5% dari nilai total ekspor Indonesia sekitar 2 milyar \$US pada tahun 2007 (Departemen Perindustrian, 2007). Selain dari itu

permintaan udang dunia sangat besar dan terus meningkat. Berdasarkan data dari National Marine Fisheries Service (NMFS) ekspor udang dari Indonesia ke Amerika Serikat selama periode Januari sampai Agustus pada tahun 2006 (sebesar 26.169 ton) atau meningkat sebesar 57% bila dibandingkan dengan tahun 2005 (sebesar 16.720 ton) ([www.kcm.com](http://www.kcm.com), 2006).

Pada tahun 2005 pernah terjadi penurunan produksi udang dunia yang disebabkan beberapa negara produsen udang menghentikan kegiatan produksi, kondisi ini merupakan peluang besar bagi produksi udang nasional. Peluang ini dapat dimanfaatkan dengan menghidupkan kembali budidaya udang di daerah yang pernah menjadi sentra produksi udang. Oleh karenanya usaha budidaya udang yang berkembang secara intensif di tambak perbesaran menuntut ketersediaan benur secara kontinu, sebab ketersediaan benur berperan penting bagi keberhasilan tambak udang untuk mencapai produksi maksimum dan menjaga kontinuitas produksi. Pemerintah Kabupaten Situbondo merespon hal tersebut dalam Keputusan Bupati No. 18/2005 tentang perijinan pembentukan wilayah bagi usaha tambak dan hatchery (Anonim, 2007).

Budidaya perbesaran udang dan usaha pembenihan udang, baik secara tradisional maupun modern oleh perusahaan swasta maupun masyarakat, menyebabkan adanya nilai tambah bagi sektor perikanan. Penyediaan benur sebagai mata rantai awal dalam sistem produksi udang dapat menjadi faktor pembatas apabila benur tidak tersedia dalam jumlah yang cukup.

Usaha produksi benur telah berkembang, namun banyak hatchery mengalami keterbatasan produksi pada musim tertentu, hal ini menyebabkan tidak seimbanginya permintaan dengan persediaan benur yang ada (Sutaman, 2003). Balai Budidaya Air Payau (2007) mencatat bahwa produk benur di Kabupaten Situbondo diproduksi sebesar 70% oleh hatchery skala besar dan 30% oleh hatchery skala rumah tangga (HSRT).

Mengingat peran HSRT sebagai penyedia benur pada produksi udang, yang dapat diusahakan oleh perorangan karena nilai investasinya tidak terlalu besar, tidak memerlukan lahan yang luas dan izin usaha lebih mudah, maka HSRT menarik untuk dikaji. Tetapi HSRT menghadapi struktur pasar yang oligopsoni dimana harga jual ditentukan oleh pedagang dan memberi keuntungan rendah bagi produsen (Prawitasari, 2008). Penelitian Prawitasari (2008) mengenai struktur, perilaku dan keragaan pasar benur menunjukkan bahwa saluran pemasaran benur di Kabupaten Situbondo ada beberapa pola yaitu: dari produsen ke petambak, dari produsen ke pedagang lokal ke petambak, dari produsen ke pedagang antar pulau ke petambak dan dari produsen ke pedagang lokal ke pedagang antar pulau ke petambak. Dengan demikian produsen benur dihadapkan pada pilihan beberapa rantai pemasaran. Struktur pasar berada pada kondisi oligopsoni dengan perilaku pedagang sebagai penentu harga, serta ditunjang karakter komoditas benur yang membutuhkan perlakuan khusus, mengakibatkan keragaan masing-masing pelaku pasar mencerminkan kegiatan usaha dengan keuntungan yang berbeda.

Sementara pada waktu yang akan datang pemasaran cenderung akan menjadi bebas, maka langkah yang perlu dilakukan adalah pengembangan sistem ekonomi, baik usaha maupun investasi dan pengembangan kemampuan pemasaran yang pada akhirnya diharapkan akan meningkatkan efisiensi pemasaran dan kemampuan daya saingnya ([www.dkp.co.id](http://www.dkp.co.id), 2005).

Komoditas perikanan akan menghadapi persaingan yang semakin ketat karena perdagangan antar negara cenderung menjadi bebas pada waktu mendatang. Oleh karena itu analisis daya saing menjadi sangat penting untuk melihat kemungkinan apakah komoditas benur mampu bersaing dan dapat bertahan untuk memenuhi permintaan dalam negeri atau sebagai substitusi impor atau untuk promosi ekspor (Bank Indonesia, 2006).

Selain ditentukan oleh keunggulan komparatif, keunggulan kompetitif, daya saing suatu komoditas juga tidak terlepas dari pengaruh kemampuan pemasaran yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan berlaku yang dapat mempengaruhi tingkat dan stabilitas input dan output, investasi publik, biaya dan penerimaan. Instrument kebijakan harga akan menimbulkan transfer baik dari produsen kepada konsumen dari komoditas bersangkutan, maupun anggaran pemerintah atau sebaliknya. Oleh sebab itu intervensi pemerintah dalam bentuk kebijakan produksi, pemasaran dan perdagangan perlu ditelaah, apakah berpengaruh terhadap harga input dan output dalam usaha benur di Kabupaten Situbondo.

#### Perumusan Masalah

Dari uraian yang dikemukakan di atas, penelitian ini ingin menjawab beberapa permasalahan :

- Apakah usaha benur di Kabupaten Situbondo mempunyai daya saing?
- Apakah kebijakan pemerintah terhadap input tradeable dapat mempengaruhi usaha benur di Kabupaten Situbondo?
- Apakah kebijakan pemerintah terhadap input non tradeable mempengaruhi usaha benur di Kabupaten Situbondo?
- Apakah kebijakan pemerintah terhadap output mempengaruhi usaha benur di Kabupaten Situbondo?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui daya saing komoditas benur di Kabupaten Situbondo dan mengetahui pengaruh kebijakan pemerintah terhadap usaha benur HSRT di Kabupaten Situbondo.

#### METODE PENELITIAN

##### Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Situbondo sebagai salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang memiliki potensi sumberdaya kelautan yang cukup besar. Penentuan daerah penelitian dilakukan secara sengaja (*purposive method*), dengan pertimbangan:

- Memiliki potensi sumberdaya laut yang memadai;
- Merupakan daerah penghasil benur di Jawa Timur;
- Pertumbuhan hatchery skala rumah tangga cukup besar;

4) Harga benur lebih tinggi bila dibandingkan dengan benur daerah lain.

### Populasi dan Contoh

Populasi dalam penelitian ini meliputi produsen benur *hatchery* skala rumah tangga (HSRT) sebanyak 98 orang, populasi pedagang lokal sebanyak 20 orang, populasi pedagang antar pulau sebanyak 8 orang. Penetapan sampel produsen benur menggunakan metode "Stratified proportionate random sampling" dimana sampel diambil dari populasi produsen benur yang mengusahakan *hatchery* skala rumah tangga di Kabupaten Situbondo. Populasi produsen benur dibagi dalam kelompok yang homogen yang disebut strata, kemudian anggota sampel ditarik dari setiap strata secara proporsional dengan alokasi berimbang. Populasi produsen benur dibagi dalam tiga strata kapasitas produksi berdasarkan jumlah bak, yaitu strata I untuk kapasitas produksi kecil kurang dari 10 bak, strata II untuk kapasitas produksi sedang (10 - 19) bak dan strata III untuk kapasitas produksi (20 - 30) bak. Jumlah sampel seluruhnya ditentukan sebesar 30 HSRT dan jumlah masing-masing sub sampel per strata dihitung dengan rumus :

$$n_i = \frac{N_i}{N} \times n$$

dimana :

- $n_i$  = Jumlah sub sampel tiap strata.
- $n$  = Jumlah sampel seluruhnya.
- $N_i$  = Jumlah populasi tiap strata.
- $N$  = Jumlah populasi seluruhnya (Nasir, 2004).

Selanjutnya jumlah populasi dan jumlah sampel produsen benur *hatchery* skala rumah tangga yang diamati ditunjukkan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Populasi dan Sampel Produsen Benur *Hatchery* Skala Rumah Tangga

No	Strata	Populasi	Sampel
1.	I (1 - 10 bak)	32	10
2.	II (11 - 20 bak)	40	12
3.	III (21 - 30 bak)	26	8
	Jumlah	98	30

### Metode Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : data Primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai aspek usaha benur dengan cara wawancara. Data sekunder berasal dari beberapa instansi yang terkait dengan budidaya dan usaha benur, yaitu : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo, Balai Budidaya Air Payau Situbondo, Unit Pelaksana Pembenihan Udang Windu Situbondo, Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo serta instansi lain yang terkait.

### Teknik Analisis Data

Daya saing komoditas benur diukur dengan menggunakan analisis *Policy Analisis Matrix* (PAM).

Indikator yang digunakan adalah *Private Cost Ratio* (PCR) dan *Domestic Resource Cost Ratio* (DRCR). Menurut Soetriono (2006) pendekatan PAM yang disampaikan oleh Monkey dan Person merupakan sistem analisis dengan memasukkan berbagai kebijakan yang mempengaruhi penerimaan dan biaya produksi. Beberapa komponen dalam PAM nantinya akan digunakan untuk melihat penerimaan dan untuk mengetahui keuntungan dalam usaha benur, selain itu juga untuk mengetahui dampak kebijakan pemerintah yang sedang berlangsung.

### Rumus PCR

$$PCR = \frac{C}{A - B}$$

Keterangan :

- C = Biaya input non tradeable private
- A = Penerimaan private
- B = Biaya input tradeable private

Kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut :

- 1) Komoditas benur memiliki daya saing jika nilai PCR < 1.
- 2) Komoditas benur tidak memiliki daya saing jika nilai PCR > 1.

### Rumus DRCR

$$DRCR = \frac{G}{E - F}$$

Keterangan :

- E = Penerimaan sosial
- F = Biaya input tradeable sosial
- G = Biaya input non tradeable sosial

Kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut :

- 1) Komoditas benur memiliki daya saing jika nilai DRCR < 1.
- 2) Komoditas benur tidak memiliki daya saing jika nilai DRCR > 1.

Sementara berbagai kebijakan pemerintah terhadap input maupun output usaha budidaya benur dianalisis dengan :

### 1) Kebijakan pemerintah terhadap input tradeable

Kebijakan pemerintah terhadap input tradeable dapat menggunakan indikator *Input Transfer* (IT) digunakan untuk menunjukkan besarnya subsidi yang perlu diberikan oleh pemerintah kepada produsen dan indikator *Nominal Protection Coefficient Input* (NPCI) digunakan untuk menunjukkan adanya proteksi terhadap produsen.

### Rumus IT dan NPCI

- a) IT = B - F
- b) NPCI = B/F

Keterangan :

- B = Biaya input tradeable private
- F = Biaya input tradeable sosial

Kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut :

- a) IT bernilai negatif, berarti menunjukkan adanya kebijakan pemerintah terhadap input (terdapat subsidi).

- b) IT bernilai positif, berarti menunjukkan tidak ada kebijakan pemerintah terhadap input (tidak terdapat subsidi).
  - c) NPCI > 1, menunjukkan adanya proteksi terhadap produsen input sedang sektor yang menggunakan input tersebut dirugikan dengan tingginya biaya produksi.
  - d) NPCI < 1, menunjukkan tidak ada proteksi terhadap produsen input.
- 2) **Kebijakan pemerintah terhadap input non tradeable**

Kebijakan pemerintah terhadap *input non tradeable* dapat menggunakan indikator *Effective Protection Coefficient (EPC)* yang menunjukkan nilai tambah terhadap komoditas, *Profitability Coefficient (PC)* digunakan untuk mengukur pengaruh insentif dari seluruh kebijakan pemerintah. *Subsidy Ratio to Producers (SRP)* yang menunjukkan indikasi seberapa besar kebijakan pemerintah meningkatkan atau mengurangi biaya produksi.

**Rumus EPC :**

$$EPC = \frac{\text{Revenue Private (A)} - \text{Biaya Input Tradeable Private (B)}}{\text{Revenue Sosial (E)} - \text{Biaya Input Tradeable Sosial (F)}}$$

Kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut :

- 1) EPC < 1 atau EPC = 1 menunjukkan insentif pemerintah tidak efektif atau tidak ada insentif pemerintah.
- 2) EPC > 1, menunjukkan ada insentif pemerintah.

**Rumus PC :**

$$PC = \frac{\text{Keuntungan Private (D)}}{\text{Keuntungan Sosial (H)}}$$

Kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut :

- 1) PC < 1, menunjukkan keuntungan sosial lebih besar dari keuntungan privat.
- 2) PC > 1, menunjukkan keuntungan sosial lebih kecil dari keuntungan privat.

**Rumus SRP :**

$$SRP = \frac{\text{Transfer Bersih (L)}}{\text{Revenue Sosial (E)}} :$$

Kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut :

- 1) SRP bertanda positif menunjukkan kebijakan pemerintah berperan dalam meningkatkan biaya produksi.
- 2) SRP bertanda negatif menunjukkan kebijakan pemerintah berperan dalam mengurangi biaya produksi.

3) **Kebijakan pemerintah terhadap output**

Kebijakan pemerintah terhadap output dapat menggunakan indikator *Output Transfer (OT)* digunakan untuk melihat sejauh mana kebijakan pemerintah dalam memberikan insentif kepada produsen dan menggunakan indikator *Nominal Protection Coefficient Output (NPCO)* digunakan untuk melihat apakah suatu komoditas mendapat proteksi output atau tidak.

**Rumus OT dan NPCO :**

- a) OT = A - E
- b) NPCO = A/E

Keterangan :

- A = Penerimaan private.
- E = Penerimaan sosial.

Kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut :

- a) OT bernilai positif, berarti produsen menerima harga yang lebih tinggi atau produsen menerima insentif dari kebijakan pemerintah.
- b) OT bernilai negatif, berarti produsen menerima harga yang lebih rendah atau produsen tidak menerima insentif dari kebijakan pemerintah.
- c) NPCO > 1, menunjukkan adanya kebijakan pemerintah terhadap output yang menyebabkan harga privat lebih besar dari harga di pasaran dunia.
- d) NPCO < 1, menunjukkan adanya kebijakan pemerintah terhadap output yang menyebabkan harga privat lebih kecil dari harga di pasaran dunia.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Keunggulan Komparatif**

Keunggulan komparatif merupakan potensi keunggulan yang dimiliki oleh wilayah atau komoditas karena sumberdaya yang dimilikinya. Salah satu alat untuk mengukur keunggulan komparatif adalah analisis efisiensi penggunaan sumberdaya domestik atau *Domestic Resource Cost Ratio (DRCR)* dengan nisbah koefisien biaya sumberdaya domestik kurang dari 1, berarti komoditas tersebut memiliki keunggulan komparatif.

Berdasar rata-rata nilai tukar resmi tahun 2007 ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id), 2007) sebesar Rp. 9.136,20 per US \$, maka diperoleh *Standart Coeffisien Factor (SCF)* : 0.82410963 dan harga bayangan atau *Shadow Exchange Rate (SER)* : Rp. 11.086,148. Hasil analisis diperoleh nilai Biaya Sumberdaya Domestik (BSD) sebesar Rp. 2.029,24 atau di bawah harga bayangan, sehingga diperoleh nisbah DRCR 0.183. Hal ini berarti komoditas benur memiliki keunggulan komparatif yang diperoleh karena biaya untuk memproduksi di Indonesia hanya membutuhkan 18,31% dari biaya impor, sehingga pemenuhan benur jika diusahakan di dalam negeri akan mampu menghemat devisa negara sebesar 81,69% dari besarnya biaya impor yang diperlukan.

Keunggulan komparatif usaha pembenihan udang secara nyata dipengaruhi oleh harga sosial output (udang) di pasar dunia Rp. 69.000 – Rp.71.000 per kg yang lebih mahal daripada harga privat Rp. 50.000 – Rp. 60.000 per kg. Semakin tinggi harga sosial output maka nisbah DRCR akan semakin kecil, yang berarti tingkat keunggulan komparatifnya semakin tinggi. Sedangkan biaya yang dapat dihemat dari usaha pembenihan udang antara lain, tingkat harga sosial *endowment factors* yang rendah. Upah tenaga kerja sosial dan privat pada penelitian ini tidak dibedakan secara nyata karena tingkat upah yang beragam di daerah penelitian dan secara umum berpatokan bahwa tenaga kerja Indonesia dianggap *unskill labor*. Sedangkan perbedaan *endowment factors* yang ada semata-mata dikarenakan penggunaan bahan bakar generator yang diperoleh dari impor, sehingga upah sosial dari sewa tenaga kerja

generator seolah-olah berbeda dengan upah tenaga kerja privat.

Selain *endowment factors* yang murah, produktivitas merupakan faktor penentu keunggulan komparatif dari usaha pembenihan udang. Usaha pembenihan udang di daerah penelitian memiliki nisbah jauh di bawah 1 yang berarti memiliki tingkat keunggulan komparatif yang tinggi. Hal ini dimaklumi karena daerah penelitian di Situbondo memiliki produktivitas benur yang cukup tinggi, apalagi setelah dikeluarkannya varietas udang vanamie yang memiliki padat tebar yang cukup tinggi hingga mencapai 1 juta ekor per hektar, sehingga kebutuhan terhadap benur juga tinggi ([www.ristek.go.id](http://www.ristek.go.id), 2008).

### Keunggulan Kompetitif

Proses perhitungan analisis keunggulan kompetitif pada prinsipnya sama dengan keunggulan komparatif, hanya saja pada proses perhitungan input output analisis keunggulan kompetitif menggunakan harga *private* atau aktualnya. Hasil analisis Biaya Sumberdaya Domestik (BSD) berdasar harga aktualnya diperoleh BSD<sub>aktual</sub> Rp. 2.753,00 dan PCR 0.301. Dengan diperoleh PCR kurang dari 1, maka usaha pembenihan udang di daerah penelitian memiliki keunggulan kompetitif, karena dengan memproduksi udang di dalam negeri maka akan mampu menghemat devisa negara sebesar 69,9% dari seluruh biaya impor yang digunakan atau untuk menghasilkan nilai tambah 1 \$ US maka diperlukan biaya input domestik sebesar Rp. 6.386,00 berarti usaha tersebut efisien secara finansial dalam pemanfaatan sumberdaya domestik.

Salah satu *endowment factors* yang dapat dihemat, sehingga usaha benur memiliki keunggulan kompetitif adalah harga tenaga kerja yang murah. Aktivitas yang paling murah mendapat upah adalah tenaga kerja panen. Upah yang diterima berkisar Rp. 25.000,00 per orang. Berdasar teori daya saing Porter (Cho dan Moon, 2003) bahwa salah satu faktor yang menentukan keunggulan kompetitif adalah tersedianya sarana dan prasarana. Sarana produksi tersedia hampir di seluruh daerah penelitian yang ditunjukkan dengan banyaknya toko yang menjual perlengkapan usaha benur.

Keunggulan kompetitif benur tidak hanya ditunjukkan dengan efisiensi penggunaan sumberdaya domestik saja, tetapi juga dari harga yang lebih murah jika dibandingkan dengan benur produksi *hatchery* skala besar. Selain itu ditinjau dari kemudahan untuk memperoleh benur dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan konsumen, yang sebagian besar adalah tambak semi intensif.

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa usaha benur di Kabupaten Situbondo memiliki keunggulan kompetitif yang lebih tinggi dari pada keunggulan

komparatif. Hal ini mengindikasikan bahwa usaha benur mampu memberikan keuntungan yang lebih tinggi pada tingkat harga sosial. Sehingga keuntungan yang diperoleh lebih besar jika hasil produksi dijual untuk kepentingan ekspor.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa usaha benur di Kabupaten Situbondo memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif serta masih layak untuk terus diusahakan karena memberikan keuntungan yang cukup besar bagi produsen, baik ditingkat harga privat maupun ditingkat harga sosial.

Analisis kebijakan PAM digunakan untuk menganalisis intervensi tiga bentuk kebijakan pemerintah terhadap sektor perikanan, yaitu kebijakan harga, kebijakan investasi publik dan kebijakan makro ekonomi. Sedangkan keunggulan komparatif dan kompetitif (yang merupakan indikator daya saing) dari usaha benur apabila ditinjau dari efisiensi sumberdaya domestik tidak terlepas dari intervensi pemerintah. Oleh karena itu intervensi pemerintah melalui instrumen kebijakannya baik melalui subsidi input maupun output perlu dicermati, apakah kebijakan tersebut memihak atau dirasakan kemanfaatannya oleh produsen. Di sisi lain tujuan analisis ini antara lain untuk menghitung *transfer effects*, sebagai dampak dari sebuah kebijakan.

### Kebijakan Pemerintah Terhadap Input Tradeable

Untuk mengetahui adanya kebijakan pemerintah terhadap nilai input tradeable dalam usaha benur di Kabupaten Situbondo diukur dengan menggunakan indikator *Input Transfer* (IT) dan untuk melihat nilai insentif yang diberikan oleh pemerintah terhadap input digunakan indikator *Nominal Protection Coefficient Input* (NPCI). Beberapa komponen pendukung input transfer dan nominal protection coefficient input adalah biaya input tradeable pada tingkat harga aktual dan harga sosial, sehingga akan diketahui seberapa besar rasio harga domestik dari *input tradeable* berbeda dengan harga sosialnya.

Hasil analisis diperoleh NPCI 0,99 maka nisbah NPCI kurang dari 1 mengindikasikan bahwa terdapat kebijakan pemerintah terhadap input tradeable yang menguntungkan produsen benur, dimana harga input tradeable di tingkat produsen lebih rendah dari harga dunia, sehingga produsen membayar biaya input tradeable lebih rendah dari yang seharusnya dibayarkan. Adanya kebijakan pemerintah berupa pemberian subsidi pupuk Urea, TSP, KCL dan Ziolit telah meringankan produsen dalam penggunaan biaya input tradeable. Kondisi ini menggambarkan produsen dapat menghemat penggunaan input sebesar 1% dari seluruh input yang digunakan karena adanya transfer input sebesar Rp. 1.626.167 per hektar (Tabel 2. Transfer Input pada Usaha Benur).

Tabel 2. Transfer Input pada Usaha Benur

NO	INDIKATOR KEBIJAKAN	NILAI
1	Transfer Input	-1,626,167
2	Nominal Protection Coefficient Input (NPCI)	0.99

Kebijakan pemerintah terhadap *input tradeable* berupa subsidi pupuk akan berdampak positif terhadap peningkatan keuntungan usaha benur di Kabupaten Situbondo. Oleh karena itu diharapkan pemerintah dapat

mempertahankan atau meningkatkan subsidi terhadap *input tradeable*. Subsidi tersebut dapat diberikan secara langsung maupun dengan cara lain.

Tabel 3. Distribusi Harga Pupuk di Tingkat Dunia dan Produsen

No	Jenis Pupuk	Harga Pupuk Dunia (Rp)	Harga di Tingkat Produsen (Rp)
1	Urea	1,715	1,100
2	TSP/SP-36	2,247	1,600
3	KCl	2,016	1,400
4	Ziolit	2,418	1,000

Sumber : Harga Pupuk Dunia ([www.bulog.co.id](http://www.bulog.co.id), 2007)

Adanya subsidi pupuk tidak menyimpang dari fenomena analisis NPCI walaupun ada beberapa saat terjadi kelangkaan pupuk, hal ini bisa dilihat dari harga pupuk di tingkat produsen masih lebih rendah dari harga dunia (Tabel 3. Distribusi Harga Pupuk Di tingkat Dunia) Secara agregat pemerintah telah mengalokasikan subsidi pupuk Rp. 3 trilyun pada tahun 2007 ([www.bulog.co.id](http://www.bulog.co.id), 2007)

mengindikasikan jika harga domestik lebih rendah dari harga dunia. kebijakan ini menguntungkan bagi konsumen karena konsumen membayar harga output lebih rendah dari yang seharusnya dibayarkan, sehingga terjadi transfer pendapatan dari produsen ke konsumen sebesar 14% atau Rp. 35.000.000,00 Pemerintah juga telah memberlakukan tarif ekspor untuk produk perikanan sebesar 7% sampai 13%. Pemberlakuan tarif ekspor ini menyebabkan produsen harus menanggung biaya ekspor lebih tinggi, namun jika di pasarkan di dalam negeri produsen mengalami penurunan keuntungan sebesar 14% dari yang seharusnya diterima. Selain hal tersebut, pemerintah juga memberlakukan tarif impor untuk input usaha benur berupa bahan-bahan kimia dan obat-obatan dengan tarif sebesar 10% yang menambah beban biaya input produsen.

#### Kebijakan Pemerintah Terhadap Output

*Nominal Protection Coefficient Output* (NPCO) menunjukkan rasio seberapa besar harga domestik (harga privat) dengan harga sosialnya atau sejauhmana kebijakan pemerintah mampu memberikan insentif ekonomi terhadap *stakeholders*. Hasil analisis diperoleh nisbah NPCO 0.86 maka nisbah NPCO < 1,

Tabel 4. Transfer Output Pada Usaha Benur

NO	INDIKATOR KEBIJAKAN	NILAI
1	Transfer Output	-35,000,000
2	Nominal Protection Coefficient Output (NPCO)	0.86

*Profit Coefficient* (PC) merupakan rasio antara keuntungan privat dengan keuntungan sosial. Hasil analisis diperoleh 0,52 maka PC < 1 berarti keuntungan sosial lebih besar daripada keuntungan privat. Kondisi ini mengindikasikan keuntungan yang diterima produsen saat ini lebih rendah daripada keuntungan yang seharusnya diterima, sehingga terjadi transfer keuntungan sebesar Rp. 33.530.629,00 (Tabel 5. Transfer Keuntungan pada Usaha Benur), dengan demikian kebijakan pemerintah yang dilakukan selama ini menghambat terhadap surplus produsen sebesar 48% dari yang harus diterimanya. Kondisi ini bersinergi dengan hasil analisis kebijakan terhadap output yang menunjukkan adanya transfer keuntungan dari produsen terhadap konsumen sebesar 14%.

Tabel 5. Transfer Keuntungan pada Usaha Benur

NO	INDIKATOR KEBIJAKAN	NILAI
1	Transfer Keuntungan	-33,530,629
2	Profit Coefficient (PC)	0.52

#### Efek Transfer Gabungan Kebijakan Pemerintah

*Effective Protection Coefficient* (EPC) menunjukkan efek transfer gabungan yang disebabkan oleh sebuah kebijakan (*policy transfer*), baik *transfer output tradeable* maupun *input tradeable*. Hasil analisis diperoleh EPC 0.59 (Tabel 6. Nisbah EPC dan SRP). atau lebih dikenal dengan satuan *Effective Rate of Protection* (ERP) sebagai ukuran distorsi perdagangan yang dinyatakan dengan  $ERP = (EPC - 1) \times 100\% = -$

0.41. maka  $EPC < 1$ , atau  $ERP - 41\%$  berarti usaha benur selama ini sudah *feasible*.

Kondisi tersebut berhubungan dengan nilai *Subsidy Ratio Producer* (SRP) dengan nisbah -0.14, artinya kebijakan pemerintah pada input produksi akan menaikkan biaya produksi yang disebabkan produsen terbebani biaya lebih besar 14% dari biaya yang semestinya dikeluarkan. Subsidi yang diberikan oleh pemerintah ini cenderung dinikmati oleh konsumen



dalam bentuk tingkat harga output yang lebih rendah dari yang seharusnya dibayarkan oleh konsumen. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa usaha benur selama ini sudah *feasible* dan tidak perlu adanya proteksi di atas harga *Shadow Exchange Rate (SER)* sehingga

nilai tambah akibat dari penggunaan *input tradeable* akan lebih besar diterima produsen bila pemerintah tidak melakukan intervensi pasar lebih banyak lagi.

Tabel 6. Nisbah EPC dan SRP pada Usaha Benur

NO	INDIKATOR KEBIJAKAN	NILAI
1	Effective Protection Coefficient (EPC)	0.59
2	Subsidy Ratio Producer (SRP)	-0.14

### KESIMPULAN

- 1) Komoditas benur di Kabupaten Situbondo memiliki daya saing pada tingkat harga privat dan tingkat harga sosial.
- 2) Terdapat kebijakan pemerintah terhadap input *tradeable* yang menguntungkan produsen benur HSRT.
- 3) Terdapat kebijakan pemerintah terhadap input produksi yang menaikkan biaya produksi, sehingga produsen terbebani biaya lebih besar dari biaya yang semestinya dikeluarkan.
- 4) Terdapat kebijakan pemerintah terhadap output sehingga harga domestik lebih rendah dari harga dunia. Kebijakan ini menguntungkan bagi konsumen karena konsumen membayar harga output lebih rendah dari yang seharusnya dibayarkan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2007. *Situbondo Dalam Angka 2007* Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo.
- Atjo, H. 2008. *Sulteng Kenalkan Teknologi Modern Tambak Udang* artikel pada (<http://www.beritadaerah.com>), diakses 5 Januari 2009
- Balai Budidaya Air Payau. 2007. *Produktivitas Ikan Laut dan Bijaksana*. Data Statistik Kabupaten Situbondo.
- Handoko. 2008. *Hasil Kegiatan Apresiasi Sistem Distribusi Pemasaran Produk Perikanan*

(<http://www.pdn.dkp.go.id>), diakses 8 September 2008

[Http://www.agrina-online.com](http://www.agrina-online.com), 2008. *Jatim Optimis Bisnis Udang Tetap Menjanjikan*, diakses 5 Januari 2008.

[Http://www.dkp.co.id](http://www.dkp.co.id), 2005. *Renstra Pembangunan Kelautan dan Perikanan 2005-2008*, diakses 5 Januari 2006.

[Http://www.jawapos.com](http://www.jawapos.com), 2005. *Penurunan Harga Komoditas Perikanan*, diakses 5 Januari 2006.

[Http://www.kcm.com](http://www.kcm.com), 2006. *Harga Udang Dunia Tertekan*, diakses 5 Januari 2006.

[Http://www.pdn.dkp.go.id](http://www.pdn.dkp.go.id), 2008. *Hasil Kegiatan Apresiasi Sistem Distribusi Pemasaran Produk Perikanan*. diakses 8 September 2008

[Http://www.bi.go.id](http://www.bi.go.id), 2008. *Harga Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar Amerika*. diakses 8 September 2008

[Http://www.ristek.go.id](http://www.ristek.go.id), 2008. *Petunjuk Teknis Budidaya Udang Wind*, diakses 8 September 2008

Nasir, M.2004. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia, Jakarta

Soetrisno. 2006. *Daya Saing Pertanian Dalam Tinjauan Analisis*. Bayu Media Publishing, Malang

Sutaman. 2003. *Peningkatan Produksi Perikanan Melalui Revitalisasi Tambak Udang*. Majalah Perikanan, Volume 2 Edisi 2003/2004.

Prawitasari, S. 2008. *Telaah Struktur, Perilaku, dan Keragaan Pasar Benur HSRT*, *Agritrop*, Jurnal Ilmu-ilmu Pertanian, 6(1): 57-65.